

TESIS

**ANALISIS KETERGANTUNGAN FISKAL DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA DAN TANA TORAJA**

*ANALYSIS OF REGIONAL FISCAL DEPENDENCE NORTH TORAJA
AND TANA TORAJA DISTRICT*

**RIANTO PATALLE
NIM A042182010**



kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



TESIS

ANALISIS KETERGANTUNGAN FISKAL DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA DAN TANA TORAJA

disusun dan diajukan oleh :

RIANTO PATALLE
A042182010

telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
Pada tanggal 14 Agustus 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Komisi Penasehat,

Ketua

Anggota



Prof. Dr. Haliah S.E., A.k., M.Si., C.A.

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah

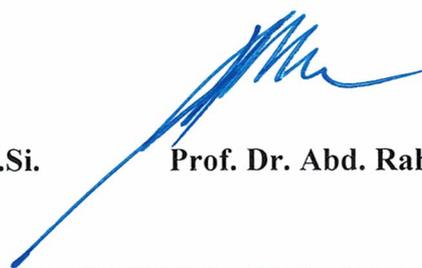


Dr. Madris, DPS., S.E., M.Si.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Nohong, S.E., M.Si.



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIANTO PATALLE
NIM : A042182010
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

ANALISIS KETERGANTUNGAN FISKAL DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA DAN TANA TORAJA

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,


RIANTO PATALLE



PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dr.Haliah, SE., Ak., M.Si., CA dan Dr. Madirs, SE., DPS., M.Si, Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Dr. Kalatiku Paembonan, SE., M.Si, Bupati Toraja Utara yang telah memberikan ijin dan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
5. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si, Ketua Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dan penyelesaian tesis ini.
6. Prof. Dr. Muhammad Ali, SE., M.S, Dr. Aini Indirajawati, SE., Ak., M.Si.,CA, Dr. Sabir, SE., M.Si., Tim Penilai Tesis yang telah memberikan arahan dan dukungan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini.

dan teman-teman Kuliah Program Magister Keuangan Daerah kelas Kabupaten



Toraja Utara dan Tana Toraja yang senantiasa bersama sejak perkuliahan, penulisan proposal, dan penyelesaian tesis ini.

8. Terkhusus kepada keluarga penulis yang selama mengikuti pendidikan tersita waktu dan perhatiannya.

Penulis

Rianto Patalle



ABSTRAK

RIANTO PATALLE. Analisis Ketergantungan Fiskal Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja (Dibimbing oleh *Haliah* dan *Madris*)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketergantungan fiskal daerah Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten TanaToraja

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data numerik. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa deret waktu tahunan. Data yang digunakan diperoleh dari (1) Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja dalam angka 2009-2018, (2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2009-2018. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto dan usia produktif terhadap ketergantungan fiskal daerah baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara dan TanaToraja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik di Toraja Utara maupun Tana Toraja selama periode penelitian masih terhitung rendah. Sebagian besar pendapatan daerah masih disumbang oleh dana perimbangan pusat atau provinsi. Rata-rata rasio ketergantungan fiskal daerah Kabupaten Toraja Utara dan TanaToraja masing-masing adalah 76,47 persen dan 76,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah belum terlaksana dengan baik di kedua daerah; (2) Berdasarkan hasil estimasi OLS, Pembentukan Modal Tetap Bruto secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah; (3) belanja pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketergantungan fiskal daerah. Belanja daerah yang produktif mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah akan mengurangi ketergantungan daerah pada dana perimbangan.

Kata Kunci: Desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi



ABSTRACT

RIANTO PATALLE. Analysis of Regional Fiscal Dependency in The North Toraja and Tana Toraja Regencies (Supervised by *Haliah* and *Madris*).

This study aims to analyze the regional fiscal dependence of the North Toraja Regency and TanaToraja Regency.

The type of data used in this research is quantitative data, namely numerical data. This study uses secondary data in the form of annual time series. The data used were obtained from (1) North Toraja and Tana Toraja Regencies in the figures 2009-2018, (2) Gross Regional Domestic Product (GRDP) 2009-2018. The analysis in this study uses the Ordinary Least Square (OLS) method to determine the effect of government spending, Gross Fixed Capital Formation, and productive age on regional fiscal dependence either directly or through economic growth in North Toraja and TanaToraja Regencies.

The results showed that the Regional Original Income (PAD) in both North Toraja and Tana Toraja during the study period was still low. Most of the regional income is still contributed by the central or provincial balancing funds. The average regional fiscal dependency ratios for North Toraja and TanaToraja Regencies are 76.47 percent and 76.11 percent, respectively. This shows that the regional autonomy policy has not been implemented well in the two regions; (2) Based on the OLS estimation results, Gross Fixed Capital Formation has a positive and significant effect on regional economic growth; (3) government spending through economic growth has a negative and significant effect on regional fiscal dependence. Productive regional spending encourages economic growth so that an increase in economic growth will increase regional income. An increase in regional income will reduce regional dependence on balancing funds.

Keywords: Fiscal decentralization, Regional Original Income, Economic Growth



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
LAMPIRAN	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Teoritis	9
2.2 Penelitian Terdahulu	24
BAB III	27
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	27
3.1 Kerangka Konseptual.....	27
3.2 Hipotesis.....	28
BAB IV.....	30
METODE PENELITIAN	30
4.1 Rancangan Penelitian	30
4.2 Jenis dan Sumber Data	30
4.3 Model Analisis	30
4.4 Definisi Operasional	33
BAB V	35
5.1 Karakteristik Daerah Penelitian	35
5.2 Perkembangan Pendapatan Daerah	37
5.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja	42
5.4 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja	44
5.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Produktif Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja	48
5.6 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja	51
5.7 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja	57



5.8 Pengujian Asumsi Klasik	59
5.9 Hasil Regresi OLS	61
BAB VI.....	79
KESIMPULAN DAN SARAN	79
6.1 Kesimpulan	79
6.2 Saran	80
LAMPIRAN	81
DAFTAR PUSTAKA.....	81



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Definisi Operasional Variabel	33
Tabel 5. 1 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014-2018	55
Tabel 5. 2 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014-2018	56
Tabel 5. 3 Tabel Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi Durbin-Watson	60
Tabel 5. 4 Tabel Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi Durbin-Watson	61
Tabel 5. 5 Tabel Estimasi Regresi OLS	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan..	5
Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual.....	27
Gambar 5. 1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja Tahun 2013-2018.....	38
Gambar 5. 2 Pertumbuhan PAD Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja	40
Gambar 5. 6 Perkembangan PMTB Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2018.....	47
Gambar 5. 7 Perkembangan Kredit Investasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017-2018	48
Gambar 5. 8 Jumlah Penduduk Toraja Utara menurut Kelompok Usia dan Pertumbuhan Penduduk Usia Produktif Tahun 2011-2018 .	49



LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Estimasi OLS	79
Lampiran 2 Hasil Heteroscedasticity Test: White	81
Lampiran 3 Tabel F.....	81
Lampiran 4 Tabel d Durbin-Watson	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi. Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (lihat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan

ngan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang
g oleh perimbangan keuangan antara pemerintah



pusat dan daerah, serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan pra syarat dalam sistem pemerintah daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2001). Fenomena yang muncul pada pelaksanaan otonomi daerah dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Pembangunan daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat.

Adanya dana perimbangan dalam otonomi daerah merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas berjalannya proses otonomi daerah. Hal ini juga sebagai wujud bahwa walaupun sistem yang diterapkan adalah sistem otonomi daerah tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketergantungan fiskal terhadap pusat terjadi pada pemerintah kota atau kabupaten. Padahal, level kota atau kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diletakkan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ironisnya, dominasi transfer dari pusat tidak diikuti dengan perbaikan pengelolaannya (*governance*).



di Ebel dan Yilmaz (2002) menunjukkan tingginya ketergantungan transfer berbanding terbalik dengan governansinya. Maksudnya,

pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam mendayagunakan PAD daripada dana transfer yang diterima dari pusat. Kondisi diatas membuahakan pertanyaan apakah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah efektif? Bukankah pemerintah daerah yang berhasil adalah yang mampu membiayai pengeluarannya sendiri melalui PAD yang didapatkannya? (lihat Nugraha, 2019).

Nugraha (2019) mengemukakan penyebab terjadinya ketergantungan fiskal pemerintah daerah. Pertama, terbatasnya ruang pemerintah daerah untuk mengkreasikan sumber-sumber penerimaan atau memperluas basis penerimaan hanya yang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kedua, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Ketiga, masih terdapatnya persaingan antar pemerintah daerah. Persaingan ini timbul dari persaingan pajak (*tax competition*) antardaerah sebagai sumber PAD masing-masing. Keempat, kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) dipersepsikan sebagai kenaikan tanggung jawab yang dibebankan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyesuaian belanja pemerintah daerah lebih tinggi daripada kenaikan DAU itu sendiri. Jika kita melihat realisasi belanja pemerintah daerah, kualitas belanja daerah masih kurang baik. Rata-rata 45 persen anggarannya untuk belanja pegawai.

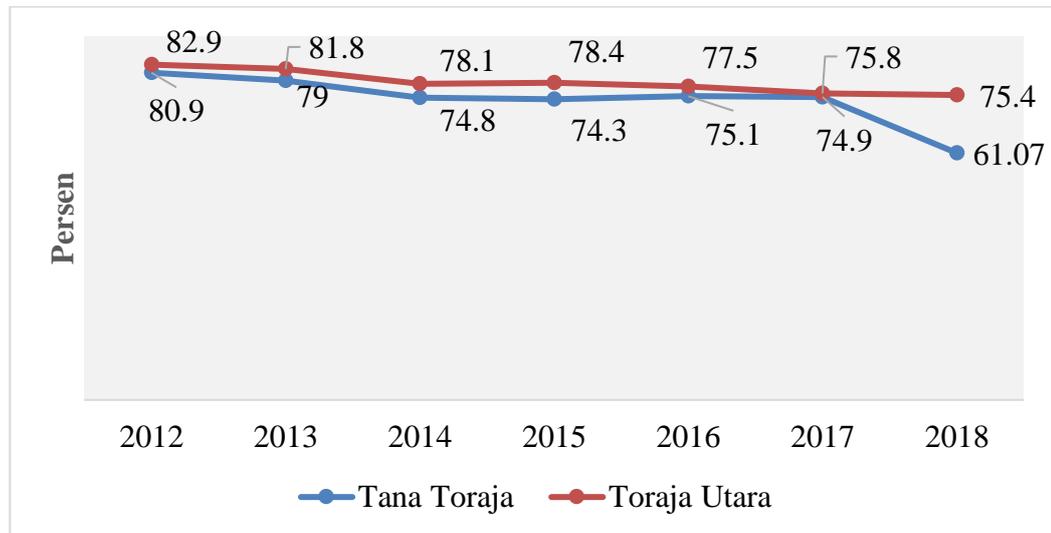


am konteks desentralisasi fiskal, Indonesia tengah menggunakan
hubungan fiskal antar pemerintahan (*fiscal intergovernmental*

relationship) dengan model Keuangan Federal (*federal finance*), dimana batas-batas resmi, penyerahan fungsi, wewenang, serta pembiayaannya sudah diatur melalui sebuah undang-undang. Model ini sudah sangat cocok, mengingat Indonesia memiliki banyak keragaman dalam aspek demografis dan etnis. UU yang mengatur otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini diharapkan kedepannya dapat mengakomodir setiap kebutuhan baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal seperti yang diharapkan dari implementasi desentralisasi fiskal ini.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah mengatur sumber keuangan pemerintah daerah sebagai standar teknis pembagian subsidi pusat kepada daerah. Pada prinsipnya pembagian sumber keuangan menurut UU ini menganut asas pemisahan terikat terhadap sumber keuangan, dimana objek pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat tidak dapat dikenakan lagi oleh pemerintah daerah.





Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2019)

Gambar 1. 1 Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan Tahun 2012-2018

Berdasarkan **Gambar 1.1**, dana perimbangan masih mendominasi total pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja dibandingkan dengan PAD dan lain-lain pendapatan yang sah. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja terhadap pemerintah pusat. Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai PAD yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. PAD yang relatif kecil, sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pemerintah pusat dan provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik melakukan kajian dengan judul “Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh langsung terhadap ketergantungan fiskal Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.
2. Apakah pengeluaran pemerintah daerah melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketergantungan fiskal Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.
3. Apakah pembentukan modal tetap bruto berpengaruh langsung terhadap ketergantungan fiskal Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.
4. Apakah pembentukan modal tetap bruto melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketergantungan Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.
5. Apakah jumlah penduduk produktif berpengaruh langsung terhadap ketergantungan fiskal Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.
6. Apakah jumlah penduduk produktif melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketergantungan fiskal Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:



1. Untuk menganalisis pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap ketergantungan fiskal Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketergantungan fiskal Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.
3. Untuk menganalisis pengaruh langsung pembentukan modal tetap bruto terhadap ketergantungan fiskal Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.
4. Untuk menganalisis pengaruh pembentukan modal tetap bruto melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketergantungan fiskal Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.
5. Untuk menganalisis pengaruh langsung jumlah penduduk yang produktif terhadap ketergantungan fiskal Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.
6. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk yang produktif melalui pertumbuhan ekonomi terhadap ketergantungan fiskal Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:



1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu administrasi publik khususnya pada ketergantungan fiskal daerah Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja.
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya dan dapat memberikan landasan untuk penelitian dan pengembangan serta dijadikan pedoman dalam merumuskan pengaruh pengeluaran daerah, pembentukan modal tetap bruto dan jumlah penduduk produktif terhadap ketergantungan fiskal daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kuznets (1955) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Tinjauan ekonomi mengenai pertumbuhan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Mankiw (2003) menyatakan PDB dapat dipandang dalam dua hal yaitu total pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian dan total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam ekonomi.

Rostow mencetuskan suatu model tahapan pertumbuhan ekonomi (*the stage of economic growth*) kedalam lima tahap. Adapun lima tahapan pertumbuhan tersebut antara lain masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, gerakan kearah kedewasaan dan masa konsumsi tinggi (Rustiadi, 2007). Todaro dan Smith (2003) mengidentifikasi bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu: (1) Akumulasi modal , akumulasi modal

apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan memperbesar



output dan pendapatan dikemudian hari; (2) Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi; (3) Kemajuan teknologi, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional. Keberagaman sifat teknologi yaitu; pertama, teknologi bersifat netral apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. Kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, dan ketiga kemajuan teknologi hemat modal.

Ketiga faktor di atas menjadi determinan penting dalam teori pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai model pertumbuhan Solow (*Solow growth model*). Suatu model yang dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan (Mankiw, 2003). Dalam model Solow (Mankiw, 2003) output atau jumlah barang yang dihasilkan dalam perekonomian tergantung pada persediaan modal dan tenaga kerja melalui sebuah fungsi produksi yang memiliki skala hasil



2.1.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan untuk memperbaiki keadaan ekonomi (Rahayu, 2010). Dalam mengatur anggaran penerimaan dan pengeluaran, pemerintah menjalankan instrumen kebijakan fiskal. Operasionalisasi dari kebijakan ini dapat berupa pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi dan pengelolaan pendapatan. Keseluruhan fungsi fiskal ini dapat tercapai secara berkelanjutan jika penerimaan sesuai dengan kebutuhan pengeluarannya.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah yang diwakili oleh kementerian keuangan. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yang menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai suatu rencana operasi keuangan pemerintah antara lain: (a) Peningkatan penerimaan karena perubahan tarif pajak berpengaruh pada ekonomi; (b) Pengeluaran pemerintah berpengaruh pada stimulasi

reekonomian melalui dampaknya terhadap sisi pengeluaran agregat; (c) Defisit anggaran (surplus, berimbang, atau defisit) sebagai respon atas



suatu kondisi; (d) Strategi pembiayaan dan pengelolaan hutang.

Definisi lain menyebutkan, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) uang pemerintah (Basri, 2002). Secara singkat dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal adalah, kegiatan yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk intervensi untuk mengelola anggaran dalam mempengaruhi perekonomian serta memaksimalkan kesejahteraan dan stabilitas dalam perekonomian. Tujuan kebijakan fiskal menurut John F. Due dalam Rahayu (2010), mengatakan terdapat tiga tujuan dari kebijakan fiskal, yaitu: (1) Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi; (2) Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga – harga secara umum; (3) Untuk menstabilkan harga – harga secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Jenis-jenis kebijakan fiskal (lihat Rahayu, 2010) yaitu (1) Kebijakan fiskal ekspansioner, yaitu suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan belanja pemerintah dan atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan PDB dan menurunkan angka pengangguran; (2) Kebijakan fiskal kontraksioner, yaitu suatu

kebijakan yang diambil pemerintah dengan melakukan pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak yang dirancang untuk



menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi.

2.1.3 Otonomi Daerah

Otonomi secara etimologi berasal dari bahasa atau kata latin yaitu "autos yang berarti "sendiri", dan "nomos" yang berarti "aturan". Sehingga otonomi diartikan "pengundangan sendiri", "mengatur atau memerintah sendiri". Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Kaloh (2007) menyatakan bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi "daerah" dalam pengertian wilayah atau teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai manfaat dan argumen yang mendukung

haan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa adalah sistem yang terbaik. Berbagai kelemahan masih



menyertai pelaksanaan otonomi yang harus diwaspadai dalam pelaksanaannya.

Prud'homme (1994) dalam Fahmi (2015) mencatat beberapa kelemahan dan dilema dalam otonomi daerah, antara lain: (1) Menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin; (2) Mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal; (3) Mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya *public hearing*; (4) Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 dibagi menjadi tiga, yaitu: desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

2.1.4 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan

Menurut Khusaini (2006) desentralisasi fiskal merupakan transfer kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan



yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Parson dalam Zulyanto (2010) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai berbagi (sharing) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, dimana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah pusat oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kuncoro, 2009). Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis (lihat Litvack dan Jessica, 1999): (1) Desentralisasi politik yaitu pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar berbagai peraturan; (2) Desentralisasi administrasi yaitu merupakan pelimpahan tanggung jawab dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan; (3) Desentralisasi fiskal yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah yang lebih tinggi dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

etiga jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya



desentralisasi yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai *money follow function* mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan atau pendanaan (*revenue assignment*).

Mahi (2002) menjelaskan bahwa dalam prinsip *money follow function* dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *expenditure assignment* dan *revenue assignment*. Pendekatan *expenditure assignment* menjelaskan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sementara *revenue assignment* menjelaskan tentang peningkatan kemampuan keuangan melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan.

2.1.5 Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Implementasi otonomi daerah yang direncanakan akan diberlakukan pada tahun 2001 yang mengacu pada dua UU, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah. UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (UU-PKPD) merupakan UU yang

ur perimbangan keuangan atau desentralisasi fiskal antara
tah pusat dan daerah berdasarkan pembagian fungsi dan



wewenang penyelenggaraan pemerintah diantara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten atau kota dalam UU tentang pemerintah daerah (Alishjahbana, 2000).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain (lihat Mardiasmo, 2009): (1) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*); (2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; (3) Meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional; (4) Tata kelola, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran; (5) Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 mekanisme transfer kebijakan dari pusat ke daerah telah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) (Mardiasmo, 2009). Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, struktur komponen belanja dapat diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi dan ekonomi

belanja). Lebih lanjut dijelaskan bahwa berdasarkan Pemendagri 3 Tahun 2006, belanja terdiri dari belanja tidak langsung (belanja



pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga) dan belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal).

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan (SILPA, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pembayaran pinjaman, penerimaan piutang daerah) dan pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, investasi (penanaman modal) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah).

2.1.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Saragih dan Khadafi (2003) mengemukakan bahwa APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan

daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka dapat



berdampak positif terhadap PAD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2004) adalah sebagai berikut: (1) rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; (2) adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; (3) jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; (4) Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun. Sebagai alat pemerintah yang digunakan dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan, anggaran dalam organisasi publik memiliki beberapa fungsi. Menurut Mardiasmo (2002) Fungsi utama anggaran daerah adalah sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi, evaluasi kinerja, memotivasi manajemen, dan menciptakan ruang publik.

Struktur APBD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali

erah.

Jenis-jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut: (1)



Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (a) Pajak daerah; (b) Retribusi daerah; (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta; (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah, penerimaan komisi, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda distribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan; (2) Dana perimbangan, dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan, meliputi: (a) Dana Bagi Hasil; (b) Dana Alokasi Umum; (c) Dana Alokasi Khusus; (d) Dana Otonomi Khusus/Dana Desa; (e) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah dibagi menurut jenis pendapatan meliputi: (a) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan atau lembaga atau organisasi dalam negeri, kelompok masyarakat atau perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; (b) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan

alam; (c) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota; (d) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah



lainnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: (1) Belanja tidak langsung, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga; (2) Belanja langsung, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

2.1.7 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 60 menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah, meliputi: (a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA); (b) Pencairan dana cadangan; (c) Penerimaan pinjaman dan obligasi; (d) Hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan; (e) Penerimaan kembali pembayaran pinjaman; (f) Penerimaan piutang daerah. Sementara

eluaran pembiayaan daerah, meliputi: (a) Pembentukan dana; (b) Investasi (penanaman modal) pemerintah daerah; (c)



Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo; (d) Pemberian pinjaman daerah.

2.1.8 Investasi

Teori pertumbuhan Harrod-Domar menepatkan investasi sebagai faktor penting dalam perekonomian suatu negara. Menurut Harrod-Domar setiap perekonomian pada dasarnya harus menyisihkan atau menabung suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau mengganti barang-barang modal yang mengalami penyusutan atau rusak dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal (*capital stock*) (Todaro dan Smith, 2006).

Model pertumbuhan Solow menyatakan bahwa persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal: investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk keperluan perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang (Mankiw, 2003).

Jhingan (2004) investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

dua sisi, yaitu: dari sisi permintaan, investasi menciptakan penghasilan pendapatan (*return on investment*), sedangkan dari



sisi penawaran investasi meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan persediaan atau akumulasi modal. Chenery dan Carter dalam Sodik (2005) mengemukakan pemikiran tentang pentingnya investasi khususnya dalam bentuk penanaman modal asing dalam pembangunan di negara berkembang yaitu bahwa dana eksternal sebagai sumber investasi dapat dimanfaatkan oleh negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan Solow dan pendapat Todaro dan Smith (2003) yang menegaskan bahwa investasi memainkan peran penting dalam penggerakan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal dari peningkatan investasi akan memperbesar kapasitas produksi, meningkatkan kesempatan kerja, menaikkan pendapatan nasional sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi.

2.1.9 Pertumbuhan Penduduk

Todaro dan Smith (2003) mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja merupakan salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih besar mampu meningkatkan tenaga kerja produktif. Sementara dari sisi permintaan, pertambahan jumlah penduduk berarti meningkatkan ukuran pasar domestik, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

m (1996) mengatakan bahwa tingginya tingkat pertumbuhan
 ik di negara Jepang dan Korea disebabkan oleh sumber daya



manusia yang berkualitas sehingga mudah menyerap tenaga kerja dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekonomi yang terjadi. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Akai dan Sakata (2002) yang menggunakan modal manusia sebagai variabel kontrol untuk meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dengan menggunakan regresi data panel dari lima puluh negara bagian di Amerika Serikat dalam periode waktu 1992-1996, memperlihatkan bahwa kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Zhang dan Zou (1998) menunjukkan bahwa alokasi sumber daya fiskal dari desentralisasi ekonomi telah mempengaruhi pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional China sejak tahun 1970. Penelitian ini menunjukkan bagaimana alokasi sumber daya fiskal antara pemerintah pusat dan daerah telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sejak reformasi yang dimulai pada akhir 1970. Variabel penelitian adalah pertumbuhan GDP, pertumbuhan tenaga kerja, rasio investasi, ekspor-impor, pajak, inflasi, desentralisasi fiskal.

Penelitian Alisjahbana (2000) menemukan bahwa implikasi UU Nomor 25 tahun 1999 untuk Jawa Barat menunjukkan pemerintah propinsi harus

hkan dan mengurangi peran dan kewenangannya ke pemerintah
en dan kota sesuai dengan perubahan fungsi atau kewenangan dan



perkiraan penurunan penerimaan APBD, yaitu sebesar 50 persen dibandingkan dengan penerimaan APBD pada pengaturan lama. Variabel penelitian ini adalah sumber penerimaan daerah yaitu PAD dan DAU. Menurutnya keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dalam era desentralisasi tidak hanya tergantung pada aspek penerimaan daerah, kemampuan ataupun kreativitas masing- masing daerah. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah di setiap tingkat dituntut untuk dapat menjadi fasilitator yang dapat memadukan kepentingan berbagai pihak dan meletakkan dasar-dasar kepentingan bersama.

Khusaini dan Prasetya (2004) menganalisis kinerja desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten Malang terhadap pengembangan ekonomi daerah. Variabel penelitian adalah APBD dari sisi penerimaan (PAD), APBD dari sisi pengeluaran (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan), PDRB, populasi penduduk, rasio pengeluaran sektoral terhadap total pengeluaran, kontribusi nilai produksi UKM, kontribusi sektoral, potensi ekonomi daerah, potensi manusiawi, potensi alam, letak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak anggaran terhadap pengembangan ekonomi lokal era sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal dari hasil estimasi yang dilakukan menunjukkan nilai yang negatif.

mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal kurang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.



Utomo dan Sumarsono (2009) mengamati dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap sektor publik dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Variabel penelitian adalah pertumbuhan ekonomi, dana desentralisasi, rasio belanja total pemerintah daerah terhadap total belanja pusat, efisiensi sektor publik, rasio belanja tidak terduga terhadap APBD. Hasil penelitian menemukan bahwa desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran berpengaruh signifikan positif terhadap inefisiensi pengeluaran publik, inefisiensi pengeluaran publik berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

